



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
{LPPD}**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan ini disusun dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang diberikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2023. Kinerja yang diukur dalam LPPD ini didasarkan atas dokumen Renstra, dengan mengacu kepada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Demikian juga Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi Pemerintah Daerah untuk menyusun LPPD setiap tahun yaitu pada akhir Tahun Anggaran.

Diharapkan agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu dokumen acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun LPPD tingkat Kabupaten serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan.

Benteng, 15 Februari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**



DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19840104 200903 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum OPD	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD ...	9
1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak dan Data Jabatan Struktural yang Belum Terisi.....	11
1.4 Inovasi	14
1.5 Penghargaan	14
1.6 Realisasi Keuangan	15
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
PEMERINTAHAN.....	17
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output.....	17
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome.....	24
2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	25
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	26
BAB IV PENUTUP	27



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 22692
BENTENG KEPULAUAN SELAYAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Kemiri No. 27

Dengan ini menyatakan bahwa :

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
163.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada Warga Negara yang mau direlokasi di Kabupaten Kepulauan Selayar	
164.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak ada unit rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	
166.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Belum ada lokasi pencadangan lahan	
168.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Seluruh penerima layanan merupakan pemilik sah atas tanah dan bangunan	
169.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Belum pernah dianggarkan	
172.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Belum ada anggaran untuk sub kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	
177.	Jumlah unit PK RTLH	Belum ada data PK RTLH	
179.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Belum pernah dilakukan pendataan	

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
182.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Belum ada perumahan yang sedang dibangun oleh pengembang atau developer yang terfasilitasi PSU	
183.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Belum ada kegiatan terkait fasilitasi air minum	
184.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Belum ada perumahan yang sedang dibangun oleh pengembang atau developer yang terfasilitasi jalan lingkungan	
185.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	Belum ada perumahan yang sedang dibangun oleh pengembang atau developer yang terfasilitasi akses sanitasi	
186.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Tidak ada kegiatan terkait RTNH	
187.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak ada rumah yang terfasilitasi akses PJU	
188.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak adanya pengembang yang memenuhi kriteria untuk penerbitan sertifikat sebagai acuan permintaan bantuan PSU Perumahan	
189.	Jumlah pengembang yang terregistrasi	Tidak ada pengembang yang teregistrasi	
190.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak ada pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	

Kegiatan tersebut diatas tidak memenuhi capaian kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya.

Benteng, 15 Februari 2024
Kepala Dinas,

DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19840104 200903 2 003



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 22692
BENTENG KEPULAUAN SELAYAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Kemiri No. 27

Dengan ini menyatakan bahwa :

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
29.	Fasilitas hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Tidak ada rumah yang terkena dampak relokasi program pemerintah	
32.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Belum ada perumahan yang sedang dibangun oleh pengembang atau developer	

Kegiatan tersebut diatas tidak memenuhi capaian kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya.

Benteng, 15 Februari 2024

Kepala Dinas,

DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19840104 200903 2 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

DPKP sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang meliputi :

- Sub Urusan Perumahan, kewenangan kabupaten/kota mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
- Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan kabupaten/kota mencakup penyelenggaraan PSU perumahan.

- Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Permasalahan Strategis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata, berdasarkan telaahan terhadap Renstra yaitu belum optimalnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak, hal ini berkaitan dengan Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia pada Misi 1 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dan Misi 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan Program yang mendukung pencapaian kedua Misi tersebut yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Program Kawasan Permukiman;
- e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- f. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terhadap Telaahan RTRW struktur ruang wilayah direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi yang ada di wilayah ini. Penatagunaan ruang yang berskala internal kabupaten/ kota diserahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada kabupaten/kota masing-masing, sehingga dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis yaitu :

- Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman,
- Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman,
- Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan permukiman secara terpadu.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kepulauan selayar bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan berupaya melakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang belum merata menyebabkan adanya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu infrastruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah perumahan dan kawasan permukiman.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur perumahan mencakup antara lain belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dimana aplikasi yang digunakan saat ini dari pemerintah antara lain e-RTLH melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), aplikasi SIBARU untuk Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Perumahan. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur kawasan permukiman antara lain masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata dan masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota, belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman, belum

optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan, jalan lingkungan dan drainase lingkungan di kawasan permukiman.

Permasalahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dimana rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan dimana kondisi rumah tinggal secara kasat mata akan memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila sanitasinya baik dan terstruktur. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar belum mencukupi sehingga pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada rumah tangga yang tidak menggunakan sanitasi yang layak karena sangat berpengaruh sekali dalam penurunan tingkat kesehatan di masyarakat. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun permasalahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam Bidang Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi 2. Belum adanya ketersediaan lahan untuk relokasi 3. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar 4. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan 5. Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

No.	Aspek	Permasalahan
2.	Permasalahan dalam Bidang Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata 2. Penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh bukan menjadi kewenangan kabupaten/kota 3. Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman 4. Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi dan air limbah di kawasan permukiman.
3.	Permasalahan dalam bidang Prasarana Sarana Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih sulit dan terbatasnya pemenuhan air bersih di beberapa pulau di wilayah Kepulauan 2. Belum adanya database prasarana, sarana dan utilitas dalam rangka pencapaian tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terletak pada titik koordinat -5.90973,121.36036, yang beralamat di Jl. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 21313 Benteng Kepulauan Selayar, Email : diperkimdpkp@gmail.com.



Visi dan Misi Kepala Daerah

Menelaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sehingga berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritim serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 dengan visi “Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan” maka Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Rumusan Pemaknaan Visi :

- **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri.
- **Kawasan Indonesia Timur** : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/ kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah: 1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional; 2. Pengelolaan sumberdaya alam

yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin; 3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan; 4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
 - b. Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;
 - c. Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - d. Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi - Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;
 - b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;
 - c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
 - d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
 - e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;
 - f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;
 - g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
 - a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
 - b. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;
 - c. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - d. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Misi

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. misi Kepulauan Selayar disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Kepulauan Selayar sebagai **Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kepulauan Selayar yang berbasis maritim meliputi :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Dari keenam Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas, maka Misi Pertama, Kedua dan Ketiga yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar. Misi Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan infrastruktur baik prasarana dan sarana yang berkualitas dan aksesibel serta merata dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perkim - Laporan Keuangan Dinas Perkim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Perkim (%)
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) - Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Rumah Layak Huni - Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU

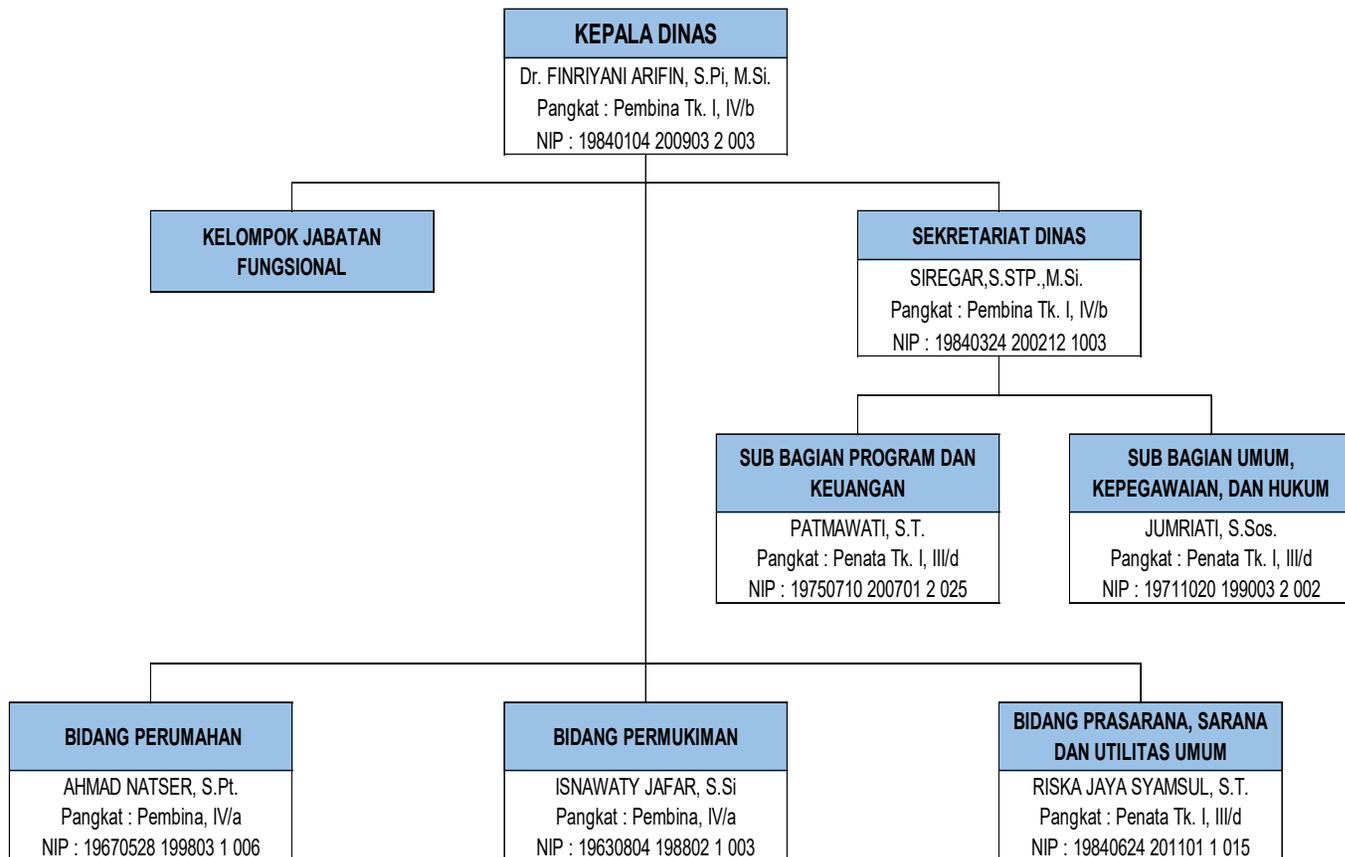
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perumahan
- d. Bidang Permukiman

- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kawasan permukiman,
- b. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),
- c. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak dan Jabatan Struktural Yang Belum Terisi

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 25 orang. Berdasarkan Golongan jabatan pada satuan kerja ini lebih didominasi golongan III sebanyak 18 orang atau 72% dari total pegawai yang ada.

Sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 20 orang atau dengan persentase 80%,

setelah itu untuk tingkat pendidikan SMA berjumlah sebanyak 3 orang atau 12%, 1 orang untuk tingkat pendidikan Magister (S2), dan 1 orang untuk tingkat pendidikan Doktor (S3) artinya memiliki potensi yang cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Potensi SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 1.3 dan Tabel 1.4.

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	P	L	
I	0	0	0
II	2	1	3
III	8	11	19
IV	1	2	3
Total	11 orang	14 orang	25 orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SLTP	-
SMA	3 Orang
Diploma	-
S1	20 Orang
S2	1 Orang
S3	1 Orang
Total	25 Orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

b. Data Jabatan Struktural

Data jabatan struktural pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 7 orang, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perumahan, Kepala Bidang Permukiman, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan Kepala Subbagian Program dan Keuangan.

c. Data Jabatan Fungsional

Data jabatan fungsional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 10 orang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini berdasarkan nomenklatur jabatannya.

Tabel 1.5
Jumlah Jabatan Fungsional

No.	Nomenklatur Jabatan	Jumlah
1.	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda	4 Orang
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1 Orang
3.	Analisis Penataan Kawasan	1 Orang
4.	Teknis Tata Bangunan dan Perumahan	1 Orang
5.	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	1 Orang
6.	Analisis Sumber Daya Manusia	1 Orang
7.	Analisis Perumahan	1 Orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

d. Jumlah Tenaga Kontrak

Jumlah Tenaga Kontrak dilihat dari tingkat pendidikannya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 55 orang.

Tabel 1.6

Jumlah Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SLTP	1 Orang
SMA	26 Orang
Diploma	3 Orang
S1	25 Orang
S2	-
S3	-
Total	55 Orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

e. Jabatan Struktural yang Belum Terisi

Tidak terdapat Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum terisi.

1.4. Inovasi

NO.	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1.5. Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Piagam/Penghargaan Pemerintah				√	Pemerintah Kabupaten	

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Penghargaan Kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Atas Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas Diberikan pada Rapat Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022					Kepulauan Selayar	
2.	Piagam Penghargaan Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Kategori "Inisiasi dalam Manajemen Risiko"				√	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	

1.6. Realisasi Keuangan

DPKP sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2023 ini adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar. Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.8.187.209.882,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.4.907.438.382,- dan Belanja Modal Rp.3.279.771.500,- selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD, anggaran keseluruhan berubah menjadi Rp.7.851.225.300,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.4.576.453.800,- dan Belanja Modal Rp.3.274.771.500,-. Perubahan anggaran ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Dari total anggaran sebesar Rp. 7.851.225.300,- anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp.6.733.040.065,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.118.185.235,- dengan realisasi keuangan sebanyak 85,76%.

Program dan Kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan kebutuhan anggaran yang telah direncanakan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 6 Program dan 17 Kegiatan dengan 46 sub kegiatan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	PERUMAHAN RAKYAT						
		158	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		101 Unit	DPKP	
		159	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		1.176 Unit	DPKP	
		160	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		7.621 Unit	DPKP	
		161	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		162 Unit RB	BPBD	
		162	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		162 Unit RB	BPBD	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		163	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		-	-	Tidak ada warga negara yang direlokasi sebagai akibat dari program Pemerintah Daerah Kab/Kota
		164	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		-	-	Tidak ada unit rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana
		165	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		1.138 Unit	BPBD DPKP	
		166	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		-	-	Belum ada lokasi pencadangan lahan
		167	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang		1.138 Unit	BPBD DPKP	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM				
		168	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		-	-	Seluruh penerima layanan merupakan pemilik sah atas tanah dan bangunan
		169	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		-	-	Belum pernah dianggarkan
		170	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		1.138 Unit	BPBD DPKP	
		171	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan		38 Unit	DPKP	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			rencana pemenuhan SPM				
		172	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		-	-	Belum ada anggaran untuk sub kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana
		173	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		225,92 Ha	DPKP	
		174	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		345 Unit	DPKP	
		175	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		47,06 Ha	DPKP	
		176	Jumlah rumah di kab/kota		35.706 Unit	DPKP	
		177	Jumlah unit PK RTLH		-	-	Belum ada data PK RTLH
		178	Jumlah rumah tidak layak huni		5.460 Unit	DPKP	
		179	Jumlah rumah yang tidak dihuni		-	-	Belum pernah dilakukan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
								pendataan
		180	Rasio rumah dan KK			0,86	DPKP	
		181	Jumlah rumah pembangunan baru			162 Unit RB	BPBD	
		182	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU			-	-	Belum ada perumahan yang sedang dibangun oleh pengembang atau developer yang terfasilitasi PSU
		183	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum			-	-	Belum ada kegiatan terkait fasilitasi air minum
		184	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan			-	-	Belum ada perumahan yang sedang dibangun oleh pengembang

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
							atau developer yang terfasilitasi jalan lingkungan
		185	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)			-	Belum ada perumahan yang sedang dibangun oleh pengembang atau developer yang terfasilitasi akses sanitasi
		186	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH			-	Tidak ada kegiatan terkait RTNH
		187	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU			-	Tidak ada rumah yang terfasilitasi akses PJU
		188	Jumlah pengembang yang tersertifikasi			-	Tidak adanya pengembang yang memenuhi

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
								kriteria untuk penerbitan sertifikat sebagai acuan permintaan bantuan PSU Perumahan
		189	Jumlah pengembang yang terregistrasi			-	-	Tidak ada pengembang yang teregistrasi
		190	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan			-	-	Tidak ada pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
1	Perumahan Rakyat							
		28	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n		1.138 Unit ----- x 100 % 1.176 Unit = 96,77%		
		29	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		-	-	Tidak ada rumah yang terkena dampak relokasi program pemerintah

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Hasil	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100 \%$	$\frac{47,06 \text{ Ha}}{225,92 \text{ Ha}} \times 100 \%$ $= 20,83\%$	DPKP	
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100 \%$	$\frac{5.460 \text{ Unit}}{35.706 \text{ Unit}} \times 100 \%$ $= 15,29\%$	DPKP	
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah satuan perumahan}} \times 100 \%$	-	-	Tidak ada perumahan yang sedang dibangun oleh pengembang atau developer

2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 tidak mengelola program dan kegiatan berdasarkan urusan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 3.1. Dasar Hukum
- 3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan
- 3.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
 1. Target Kinerja
 2. Realisasi Kinerja
- 3.4. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
- 3.5. Saran dan Tindak Lanjut

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mengelola tugas pembantuan.

**BAB IV
PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Unit Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, yakni secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh pegawai serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan :

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel;
2. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan Rumah Layak Huni;
3. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman dan Layak pada Kawasan Permukiman Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan; dan

4. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja kegiatan untuk mewujudkan cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.

Benteng, 15 Februari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR,**



DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19840104 200903 2 003

Jumlah Rumah Tangga Penerima Kegiatan Layanan yang Telah Mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni

Jumlah Rumah yang Terkena Bencana Alam	Jumlah Rumah Tangga Penerima Layanan yang Belum Mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Tangga Penerima Kegiatan Layanan yang Telah Mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni
1.176 Unit	38 Unit	1.138 Unit

Benteng, 15 Februari 2024

KEPALA DINAS

DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi.,M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I / IV b

NIP. 19840104 200903 2 003

Jumlah RT, KK, dan Jiwa Korban Bencana Yang Terfasilitasi

Jumlah Rumah yang Terkena Bencana Alam	Jumlah Rumah Tangga Penerima Layanan yang Belum Mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Tangga Penerima Kegiatan Layanan yang Telah Mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni
1.176 Unit	38 Unit	1.138 Unit

Benteng, 15 Februari 2024

KEPALA DINAS

DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I / IV b

NIP. 19840104 200903 2 003

**Jumlah Rumah Tangga Penerima Layanan yang Belum Mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni
Berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM**

Jumlah Rumah yang Terkena Bencana Alam	Yang di Tangani DPKP (RS)	Yang di Tangani BPBD (RR)	Yang di Tangani BPBD (RB)	Jumlah Rumah Tangga Penerima Layanan yang Belum Mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni
1.176 Unit	83 Unit	893 Unit	162 Unit	38 Unit

Benteng, 25 Januari 2024
KEPALA DINAS

DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi.,M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19840104 200903 2 003